

## Jokowi Minta Supaya Suplai Beras Diperbanyak untuk Kendalikan Harga

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar suplai beras terus diperbanyak untuk mengendalikan harga. Hal tersebut disampaikan saat Presiden meninjau Pasar Bulan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Selasa (31/10).

“Yang paling penting, yang pertama, suplainya didorong terus agar naik sehingga kalau suplainya banyak harga juga akan tidak ikut naik,” ujar Jokowi di siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (31/10).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk fokus pada urusan produksi beras. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta para kepala daerah untuk melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga komoditas apa pun dengan menggunakan anggaran tidak terduga.

Presiden Jokowi mengatakan, anggaran tersebut

bisa digunakan untuk biaya transportasi, distribusi, hingga mencari pasokan dari tempat produksi.

“Saya kira kalau itu dilakukan saya yakin, tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Masih baik,” ucapnya.

Selain meninjau harga-harga kebutuhan pokok, di Pasar Bulan Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk para pedagang. Menurut Presiden, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha para pedagang.

“Ya biar memiliki modal kerja yang lebih banyak sehingga bisa menambah kapasitas usahanya,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ke Pasar Bulan yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Ari Dwiwijaya, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa. ● **han**

## Ketua KPK Firlu Baru Cerita Setelah Fotonya dengan SYL Ramai Beredar

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga baru menceritakan pertemuannya dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), setelah foto pertemuan keduanya ramai beredar di media.

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK setelah memeriksa dua pimpinan lembaga anti-rasuah, Alexander Marwata dan Johanis Tanak.

“Oh cerita dia (Firlu), setelah ramai-ramai itu cerita,” kata anggota Dewas KPK, Harjono saat dihubungi wartawan yang dikutip Selasa (31/10).

Kendati demikian, Harjono belum bisa memberikan penjelasan terkait apa yang menjadi topik pembicaraan saat pertemuan itu.

“Eggak tahu (isi pem-

bicaraan), karena hanya saya ketemu ini, itu saja. Apa yang dibicarakan kita enggak tahu, beliau (Alex dan Johanis) juga enggak tahu,” ujar Harjono.

Sekadar informasi, Dewas KPK sedang melakukan pendalaman terkait pertemuan Firlu Bahuri dengan SYL dan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap SYL.

Dewan pun memanggil seluruh pimpinan KPK untuk dimintai klarifikasi.

Sejauh ini, yang sudah memenuhi panggilan KPK adalah Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Johanis Tanak. Sedangkan untuk Nawawi Pomolango belum bisa memenuhi panggilan dikarenakan sakit. Kemudian, Firlu Bahuri meminta penjadwalan ulang setelah 8 November 2023. ● **han**



### SERAH TERIMA JABATAN WAKASAL

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksmawana TNI Muhammad Ali (tengah) bersama Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldehdharma (kiri), dan pejabat lama Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono (kanan) saat serah terima jabatan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Selasa (31/10). Laksdya TNI Erwin S. Aldehdharma ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) menggantikan Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono yang akan memasuki masa purna tugas.

## Eks Komisaris PT Wika Beton Didakwa Ikut Terima Suap Rp11,2 M

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto (DTY), turut serta menerima hadiah sebanyak Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana/KSP ID, Heryanto Tanaka.

DTY didakwa menerima suap bersama dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, dalam pengurusan perkara. Dadan dan Hasbi Hasan diduga telah menerima suap terkait pengurusan perkara di MA.

Dadan dan Hasbi diduga kongkalikong dalam mengurus upaya kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA atas putusan pailit KSP Intidana. Suap tersebut berawal ketika Debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka (HTI) menghubungi Dadan untuk mengurus perkara di MA.

Atas perbuatan tersebut, Dadan dan Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● **han**

JPU di Persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Sebelumnya, KPK membongkar dugaan kongkalikong mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY), dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, dalam pengurusan perkara. Dadan dan Hasbi Hasan diduga telah menerima suap terkait pengurusan perkara di MA.

Dadan dan Hasbi diduga kongkalikong dalam mengurus upaya kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA atas putusan pailit KSP Intidana. Suap tersebut berawal ketika Debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka (HTI) menghubungi Dadan untuk mengurus perkara di MA.

Atas perbuatan tersebut, Dadan dan Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● **han**

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



### PERTEMUAN BILATERAL RI DAN BELANDA

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan bilateral di Gedung Kemenlu, Pejambon, Jakarta, Selasa (31/10). Pertemuan tersebut membahas kerja sama budaya, investasi, dan perdagangan sekaligus membahas repatriasi benda-benda cagar budaya milik Indonesia dari Belanda serta penanganan pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

# Baliho dan Bendera PDIP Sambut Jokowi di Bali, Kok Dicototi Satpol PP?

Politisi PDIP yang menyebut Presiden Jokowi telah meninggalkan PDIP, dinilai sebagai upaya membangun persepsi sebagai pihak yang terzalimi.

GIANYAR (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa (31/10) pagi. Kedatangan Kepala Negara disambut atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), seperti baliho hingga bendera di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan presiden.

Anchanya, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP justru menurunkan sejumlah baliho itu.

Menurut informasi, bendera PDIP itu tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar. Terutama di lokasi yang akan dikunjungi presiden. Bendera partai yang dipasang mulai ukuran kecil, sedang, hingga besar, tampak menghiasi sepanjang jalur.

Sementara itu, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai, PDIP Perjuangan tengah memainkan strategi politik dengan mengulirkan narasi bahwa mereka ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Dengan mengatakan Presiden Joko Widodo telah meninggalkan PDIP-P, tampak seolah PDIP-P hendak membangun persepsi mereka terzalimi dari sikap Jokowi dan keluarga,” kata Bawono kepada wartawan, Selasa (31/10).

Namun, menurut Bawono, sentilan-sentilan PDIP-P ke Jokowi dan keluarga masih belum seberapa.

PDIP-P seakan enggan berhadapan langsung dengan presiden meski merasa dikecewakan.

Bawono menyebut, PDIP-P berpotensi kehilangan suara elektoral jika terang-terangan berkonfrontasi dengan Jokowi. Sebab, sebagian pemilih partai banteng merupakan pendukung loyal mantan Wali Kota Surakarta itu.

## Pakar Hukum Ikut Menggugat Agar Gaji Dosen PTS Sama dengan Dosen PTN

JAKARTA (IM) - Pakar hukum Dr Fahri Bachmid ikut bergabung bersama dosen Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, Teguh Satya Bhakti, menguji UU Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya berharap agar gaji dosen kampus swasta disamakan dengan gaji dosen kampus negeri.

“Ada penambahan permohonan prinsipal, yaitu Dr Fahri Bachmid,” kata kuasa pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, yang juga disiarkan secara langsung di kanal YouTube, Selasa (31/10).

Fahri Bachmid saat ini

tercatat sebagai dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Sehari-hari Fahri adalah dosen hukum tata negara dan konstitusi.

Keduanya meyakini negara mampu menggaji dosen swasta dan negeri sama-sama nilainya.

“Pada dasarnya kewajiban negara kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta harusnya dipenuhi secara setara. Pembebanan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta hanya pada konteks pendidikan saja. Yakni perguruan tinggi negeri didirikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta didirikan oleh masyarakat,” ucap Viktor.

Dengan adanya pembebanan gaji tersebut, kualitas pendidikan menjadi berbeda.

Padaحال negara wajib mengalokasikan 20 persen APBN untuk dana pendidikan dengan harapan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

“Sehingga gaji diserahkan kepada kemampuan perguruan tinggi swasta yang mengacu kepada upah minimum regional (UMR) dan perjanjian kerja yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, mereka meminta agar tidak ada lagi perbedaan gaji, baik dosen swasta maupun dosen negeri.

“Menyatakan Pasal 70

ayat 3 UU Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari APBN dan APBD,’” harap pemohon.

Dalam sidang sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic memuji gugatan itu.

“Saya merasa ini permohonan yang sangat mulia. Karena ada kesadaran dari warga negara yang mempunyai kesadaran memperjuangkan hak yang sama,” kata Daniel.

Malah Daniel menilai seharusnya tidak hanya kese-

jahteraan dosen PTS dan PTN. Tetapi juga malah bagi para guru di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Memang ini masih parsial, ini kan masih dalam tingkat perguruan tinggi. Bagaimana dengan pendidikan dasar, menengah. Ini keprihatinan bersama,” ungkap Daniel.

Bagi Daniel, apa pun hasilnya nanti, gugatan Teguh telah menjadi sejarah bagi hukum ketatanegaraan Indonesia. Daniel meminta Teguh tidak malu-malu melampirkan salinan daftar gaji.

“Saya kira ini menjadi catatan sejarah di MK nanti. Terlebih nanti disetujui atau tidak. Tapi menurut saya ini permohonan yang mulia,” ucap Daniel. ● **mei**



### KETERANGAN PERS PBNU TERKAIT KONFLIK DI GAZA

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan terbaru konflik Palestina-Israel di Jakarta, Selasa (31/10). PBNU menyerukan dihentikannya tindakan yang memperalut agama untuk membenarkan penindasan dan penghancuran serta kekerasan di wilayah Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan.

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE					
Bahwa perjanjian pembiayaan :					
No.	Brand, Type & Color	Year	Transmission	Police Number	
1	HONDA CR-V RE1 2WD 2.0 CKD COKLAT METALIK 2011	2011	A/T	B 1947 KCY	
2	TOYOTA VIOS 1.5 G (NCP33R-BEMGKD) HITAM METALIK 2008	2008	M/T	B 1137 WRC	
3	DAIHATSU AYLA 1.0 X (B100RS-GMCFJ) ABU METALIK 2016	2016	M/T	D 1541 VBD	
4	NISSAN GRAND LIVINA XV ABU METALIK 2013	2013	A/T	D 1492 AAT	
5	TOYOTA YARIS 1.5 G PUTH 2016	2016	M/T	F 1869 NJ	
6	SUZUKI CARRY PICKUP AEV415P CL TYPE 2 (4X2) ABU METALIK 2021	2021	M/T	F 8830 HP	
7	MAZDA 2 1.5L HB R SILVER METALIK 2011	2011	A/T	B 1077 EMU	
8	DAIHATSU F 600 RV-GMDFJJ (Xenia VVIT 1.0) BIRU MUDA METALIK 2008	2008	M/T	F 1602 GP	
9	HONDA JAZZ GDB 1.5 S (CKD) ABU METALIK 2009	2009	A/T	F 1387 ID	
10	MITSUBISHI XPANDER 1.5 L EXCEED 4X2 HITAM MIKA 2018	2018	A/T	B 2465 BYH	
11	DAIHATSU F651RV-GMRFJ (4X2) (Xenia) HITAM METALIK 2013	2013	M/T	AA 9372 SB	
12	HONDA Honda Mobilio DDA 1.5 S CKD PUTH 2015	2015	M/T	W 1904 CL	

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 10 November 2023. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitungannya kembali.

Hormat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670